



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan

Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menghitung Pembagian dan Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Wakatobi.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian cara perhitungan dan penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Wakatobi.

BAB III PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN

Pasal 3

- (1) Anggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dialokasikan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa berpedoman pada rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 4

Alokasi anggaran Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk semua jenis pajak dan retribusi daerah.

BAB IV TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

- (1) Tata cara penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa diatur secara merata dan proporsional.

- (2) Pengalokasian bagian dari dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
- 60% (enam puluh per seratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
 - 40% (empat puluh per seratus) dibagi kepada Desa secara proporsional.

Pasal 6

- (1) Pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b adalah berdasarkan indikator prosentase realisasi pajak dan retribusi per desa terhadap total realisasi setoran pokok pajak bumi dan bangunan se-Kabupaten Wakatobi.
- (2) Pembagian dan tata cara pengalokasian ditetapkan dengan formulasi perhitungannya sebagai berikut:

BHPRD	=	RPR x 10%
ABHPRM	=	$\frac{BHPR \times 60\%}{\text{Jumlah Desa}}$
ABHPRMP	=	$\frac{RPR \text{ per Desa}}{\sum RPR \text{ Desa}} \times (40\%)$

Keterangan:

BHPRD = Bagi Hasil Pajak dan Retribusi ke Desa
RPR = Realisasi Pajak dan Retribusi
ABHPRM = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata
ABHPRMP = Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Merata Proporsional

BAB V

PENYALURAN, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 7

- (1) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa disalurkan dari Kas Umum Daerah kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Besaran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sejumlah Rp918.895.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah Rp796.295.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan retribusi daerah sebesar Rp122.600.000,00 (seratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian untuk setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Penerimaan desa yang berasal dari bagi hasil pajak dan retribusi daerah harus dimasukkan dalam APBDesa masing-masing Desa sebagai sumber pendapatan desa.
- (2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembiayaan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban

Pasal 9

Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAFTAR PENGUNDANGAN	
NOMOR/DAFTAR BERITA DAERAH	
1	SEKRETARIS DAERAH
2	AS. PEMERINTAHAN & KESRA
3	KADIS. PEMDES
4	KABAG. HUKUM
5	

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29-2-2024

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29-2-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

NADAR

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2024 NOMOR 6

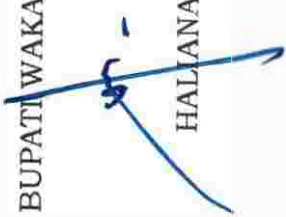
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN BAGI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar			Realisasi Pajak dan Retribusi per Desa	Alokasi Proporsional			Pagu Dana Per-Desa		
			Pajak	Retribusi	Total		Pajak	Retribusi	Alokasi Proporsional	Pajak	Retribusi	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	WANGI-WANGI	SOMBU	6.370.360	980.800	7.351.160	5.942.464	3.988.555	614.090	4.602.645	10.359.000	1.594.900	11.953.900
2	WANGI-WANGI	WAHA	6.370.360	980.800	7.351.160	6.634.098	4.452.777	685.563	5.138.340	10.823.200	1.656.400	12.489.600
3	WANGI-WANGI	TINDOI	6.370.360	980.800	7.351.160	7.267.200	4.877.712	750.987	5.628.700	11.248.100	1.731.800	12.979.900
4	WANGI-WANGI	MALEKO	6.370.360	980.800	7.351.160	3.602.469	2.417.961	372.277	2.790.238	8.788.400	1.353.100	10.141.500
5	WANGI-WANGI	LONGA	6.370.360	980.800	7.351.160	6.293.115	4.223.911	650.326	4.874.237	10.594.300	1.631.209	12.225.500
6	WANGI-WANGI	PADA RAYA MAKMUR	6.370.360	980.800	7.351.160	32.484.689	21.803.578	3.356.945	25.160.524	28.174.000	4.337.800	32.511.800
7	WANGI-WANGI	WAE LUMU	6.370.360	980.800	7.351.160	11.584.506	7.775.469	1.197.135	8.972.604	14.145.900	2.178.000	16.323.900
8	WANGI-WANGI	IPATUNO	6.370.360	980.800	7.351.160	23.758.149	15.946.364	2.455.151	18.401.514	22.316.800	3.436.000	25.752.800
9	WANGI-WANGI	WAGINOPO	6.370.360	980.800	7.351.160	5.891.180	3.954.134	608.790	4.562.924	10.324.500	1.589.600	11.914.100
10	WANGI-WANGI	TINDOI TIMUR	6.370.360	980.800	7.351.160	4.572.457	3.069.013	472.515	3.541.527	9.439.400	1.453.400	10.892.800
11	WANGI-WANGI	POSALU	6.370.360	980.800	7.351.160	3.279.320	2.201.065	338.883	2.539.948	8.571.500	1.319.700	9.891.200
12	WANGI-WANGI	KOROE ONOWA	6.370.360	980.800	7.351.160	9.477.047	6.360.952	979.351	7.340.303	12.731.400	1.950.200	14.691.600
13	WANGI-WANGI	WAPIA-PIA	6.370.360	980.800	7.351.160	4.937.721	3.314.176	510.261	3.824.437	9.684.600	1.491.100	11.175.700
14	WANGI-WANGI	POOKAMBUA	6.370.360	980.800	7.351.160	2.380.000	1.597.445	245.948	1.843.393	7.967.900	1.226.800	9.194.700
15	KALEDUPA	SOMBANO	6.370.360	980.800	7.351.160	3.358.400	2.254.143	347.055	2.601.198	8.624.600	1.327.900	9.952.500
16	KALEDUPA	SAMABAHARI	6.370.360	980.800	7.351.160	6.831.666	4.585.384	705.980	5.291.363	10.955.800	1.686.800	12.642.600

17	KALEDUPA	OLLO	6.370.360	980.800	7.351.160	4.248.243	2.851.402	439.010	3.290.412	9.221.800	1.419.900	10.641.700
18	KALEDUPA	HORUO	6.370.360	980.800	7.351.160	3.203.678	2.150.294	331.066	2.481.360	8.520.700	1.311.900	9.832.600
19	KALEDUPA	BALASUNA	6.370.360	980.800	7.351.160	3.613.795	2.425.563	373.447	2.799.010	8.796.000	1.354.300	10.150.300
20	KALEDUPA	MANTIGOLA MAKMUR	6.370.360	980.800	7.351.160	3.097.000	2.078.693	320.042	2.398.734	8.449.100	1.300.900	9.750.000
21	KALEDUPA	BALASUNA SELATAN	6.370.360	980.800	7.351.160	2.680.339	1.799.032	276.984	2.076.016	8.169.400	1.257.800	9.427.200
22	KALEDUPA	OLLO SELATAN	6.370.360	980.800	7.351.160	3.430.896	2.302.802	354.546	2.657.349	8.673.200	1.335.400	10.008.600
23	KALEDUPA	IWADURI	6.370.360	980.800	7.351.160	3.028.000	2.032.380	312.911	2.345.292	8.402.800	1.293.800	9.696.600
24	KALEDUPA	LEWUTO	6.370.360	980.800	7.351.160	3.105.838	2.084.625	320.955	2.405.580	8.455.000	1.301.800	9.756.800
25	KALEDUPA	AMBEUA RAYA	6.370.360	980.800	7.351.160	5.432.957	3.646.576	561.438	4.208.015	10.017.000	1.542.300	11.559.300
26	KALEDUPA	KALIMAS	6.370.360	980.800	7.351.160	5.848.782	3.925.676	604.409	4.530.085	10.296.100	1.535.300	11.881.400
27	TOMIA	WAITII BARAT	6.370.360	980.800	7.351.160	5.444.158	3.654.095	562.596	4.216.690	10.024.500	1.543.400	11.567.900
28	TOMIA	LAMANGGAU	6.370.360	980.800	7.351.160	28.237.400	18.952.817	2.918.033	21.870.850	25.323.200	3.898.900	29.222.100
29	TOMIA	WAITII	6.370.360	980.800	7.351.160	3.839.846	2.577.288	396.807	2.974.095	8.947.700	1.377.700	10.325.400
30	TOMIA	RUNDUMA	6.370.360	980.800	7.351.160	2.202.255	1.478.144	227.580	1.705.723	7.848.600	1.208.400	9.057.000
31	TOMIA	PATUA	6.370.360	980.800	7.351.160	2.758.894	1.851.757	285.102	2.136.860	8.222.200	1.256.000	9.488.200
32	TOMIA	TEEMOANE	6.370.360	980.800	7.351.160	6.839.861	4.590.884	706.826	5.297.711	10.961.300	1.687.700	12.649.000
33	TOMIA	KOLLO SOHA	6.370.360	980.800	7.351.160	2.976.529	1.997.833	307.592	2.305.425	8.368.200	1.288.400	9.656.600
34	TOMIA	PATUA II	6.370.360	980.800	7.351.160	1.660.043	1.114.213	171.548	1.285.761	7.484.600	1.152.400	8.637.000
35	BINONGKO	MAKORO	6.370.360	980.800	7.351.160	7.869.500	5.281.973	813.229	6.095.202	11.652.400	1.794.100	13.446.500
36	BINONGKO	KAMPO-KAMPO	6.370.360	980.800	7.351.160	5.770.444	3.873.096	596.314	4.469.410	10.243.500	1.577.200	11.820.700
37	BINONGKO	LAGONGGA	6.370.360	980.800	7.351.160	4.427.880	2.971.973	457.574	3.429.547	9.342.400	1.438.400	10.780.800
38	BINONGKO	PALAHIDU BARAT	6.370.360	980.800	7.351.160	2.130.812	1.430.192	220.197	1.650.388	7.800.600	1.201.000	9.001.600
39	BINONGKO	JAYA MAKMUR	6.370.360	980.800	7.351.160	2.416.000	1.621.608	249.668	1.871.276	7.992.000	1.230.500	9.222.500
40	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA	6.370.360	980.800	7.351.160	5.583.265	3.747.463	576.971	4.324.433	10.117.900	1.557.800	10.484.800

41	WANGI WANGI SELATAN	KOMALA	6.370.360	980.800	7.351.160	6.928.357	4.650.282	715.972	5.366.254	11.020.700	1.696.800	12.717.500
42	WANGI WANGI SELATAN	WUNGKA	6.370.360	980.800	7.351.160	5.791.548	3.887.261	598.495	4.485.756	10.257.700	1.579.300	11.837.000
43	WANGI WANGI SELATAN	MATAHORA	6.370.360	980.800	7.351.160	24.413.597	16.386.297	2.522.884	18.909.182	22.756.700	3.503.700	26.260.400
44	WANGI WANGI SELATAN	KABITA	6.370.360	980.800	7.351.160	5.455.665	3.661.818	563.785	4.225.603	10.032.200	1.544.600	11.576.800
45	WANGI WANGI SELATAN	MOLA UTARA	6.370.360	980.800	7.351.160	4.538.882	3.046.477	469.045	3.515.522	9.416.900	1.449.900	10.866.800
46	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SELATAN	6.370.360	980.800	7.351.160	10.240.332	6.873.265	1.058.229	7.931.494	13.243.700	2.039.100	15.282.800
47	WANGI WANGI SELATAN	NUMANA	6.370.360	980.800	7.351.160	23.492.953	15.768.365	2.427.745	18.196.111	22.138.800	3.408.600	25.547.400
48	WANGI WANGI SELATAN	LIYA MAWI	6.370.360	980.800	7.351.160	9.568.196	6.422.130	988.771	7.410.901	12.792.500	1.969.600	14.762.100
49	WANGI WANGI SELATAN	LIYA TOGO	6.370.360	980.800	7.351.160	9.188.040	6.166.971	949.486	7.116.457	12.537.400	1.930.300	14.467.700
50	WANGI WANGI SELATAN	KAPOTA UTARA	6.370.360	980.800	7.351.160	7.520.075	5.047.441	777.119	5.824.560	11.417.900	1.758.000	13.175.900
51	WANGI WANGI SELATAN	KABITA TOGO	6.370.360	980.800	7.351.160	4.000.390	2.685.044	413.398	3.098.441	9.055.500	1.394.200	10.449.700
52	WANGI WANGI SELATAN	LIYA ONEMAEI ANGKA	6.370.360	980.800	7.351.160	11.377.506	7.636.531	1.175.744	8.812.275	14.006.900	2.156.600	16.163.500
53	WANGI WANGI SELATAN	WISATA KOLO	6.370.360	980.800	7.351.160	3.271.487	2.195.807	338.073	2.533.881	8.566.200	1.318.900	9.885.100
54	WANGI WANGI SELATAN	MOLA SAMATURU	6.370.360	980.800	7.351.160	5.189.112	3.482.909	536.239	4.019.148	9.853.300	1.517.100	11.370.400
55	WANGI WANGI SELATAN	MOLA BAHARI	6.370.360	980.800	7.351.160	4.641.006	3.115.023	479.598	3.594.621	9.485.400	1.460.400	10.945.800
56	WANGI WANGI SELATAN	MOLA NELAYAN BHAKTI	6.370.360	980.800	7.351.160	7.423.311	4.982.487	767.119	5.749.605	11.352.900	1.748.000	13.100.900
57	WANGI WANGI SELATAN	LIYA BAHARI INDAH	6.370.360	980.800	7.351.160	3.528.292	2.368.174	364.611	2.732.785	8.738.600	1.345.500	10.084.100
58	KALEDUPA SELATAN	TAMPARA	6.370.360	980.800	7.351.160	4.719.331	3.167.594	487.692	3.655.286	9.538.000	1.468.500	11.006.500
59	KALEDUPA SELATAN	KASWARI	6.370.360	980.800	7.351.160	3.749.446	2.516.611	387.465	2.904.077	8.887.000	1.368.300	10.255.300
60	KALEDUPA SELATAN	PAJAM	6.370.360	980.800	7.351.160	3.878.293	2.603.096	400.781	3.003.877	8.973.500	1.381.600	10.355.100
61	KALEDUPA SELATAN	LANGGE	6.370.360	980.800	7.351.160	5.402.249	3.625.965	558.265	4.184.230	9.996.400	1.539.100	11.535.500
62	KALEDUPA SELATAN	TANOMEHA	6.370.360	980.800	7.351.160	3.218.854	2.160.480	332.634	2.493.115	8.530.900	1.313.500	9.844.400
63	KALEDUPA SELATAN	LENTEA	6.370.360	980.800	7.351.160	3.784.210	2.539.945	391.058	2.931.003	8.910.400	1.371.900	10.282.300

64	KALEDUPA SELATAN	DARAWA	6.370.360	980.800	7.351.160	2.406.363	1.615.140	248.672	1.863.812	7.985.600	1.229.500	9.215.100
65	KALEDUPA SELATAN	SANDI	6.370.360	980.800	7.351.160	5.423.852	3.640.465	560.497	4.200.962	10.010.900	1.541.300	11.552.200
66	KALEDUPA SELATAN	PEROPA	6.370.360	980.800	7.351.160	4.292.484	2.881.096	443.582	3.324.678	9.251.500	1.424.400	10.675.900
67	KALEDUPA SELATAN	TANJUNG	6.370.360	980.800	7.351.160	3.560.853	2.390.029	367.976	2.758.005	8.760.400	1.348.800	10.109.200
68	TOMIA TIMUR	TIMU	6.370.360	980.800	7.351.160	5.420.981	3.638.538	560.200	4.198.739	10.008.900	1.541.100	11.550.000
69	TOMIA TIMUR	DETE	6.370.360	980.800	7.351.160	2.495.231	1.674.788	257.855	1.932.643	8.045.200	1.238.700	9.283.900
70	TOMIA TIMUR	KULATI	6.370.360	980.800	7.351.160	3.216.022	2.158.580	332.341	2.490.921	8.529.000	1.313.200	9.842.200
71	TOMIA TIMUR	WAWAOTIMU	6.370.360	980.800	7.351.160	3.144.020	2.110.252	324.901	2.435.153	8.480.700	1.305.800	9.786.500
72	TOMIA TIMUR	KAHIYANGA	6.370.360	980.800	7.351.160	4.378.385	2.938.752	452.459	3.391.212	9.309.200	1.433.300	10.742.500
73	TOGO BINONGKO	WALOINDI	6.370.360	980.800	7.351.160	4.991.000	3.349.937	515.766	3.865.703	9.720.300	1.496.600	11.216.900
74	TOGO BINONGKO	OIHU	6.370.360	980.800	7.351.160	3.300.000	2.214.945	341.020	2.555.965	8.585.400	1.321.500	9.907.300
75	TOGO BINONGKO	HAHA	6.370.360	980.800	7.351.160	2.462.000	1.652.483	254.421	1.906.905	8.022.900	1.235.300	9.258.200
TOTAL			477.777.000	73.560.000	551.337.000	474.553.214	318.518.000	49.040.000	367.558.000	796.295.000	122.600.000	918.895.000

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

DAFTAR PENGESAHAN				
NO. 001/SEKRETARIS DAERAH				
1	SEKRETARIS DAERAH			
2	ASST. PEMERINTAHAN & KORA			
3	KADIS. PEMDES			
4	KADAG. HUKUM			
5				